

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

Intan Dwirianti

Pembimbing : Kirmizi dan Al Azhar A

Faculty of economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: dwiriantiintan@yahoo.com

Effect On The Budgetary Goal Characteristic To Local Government In Pelalawan

ABSTRACT

This study aims to examine: 1) the effect of budget participation on local government performance, 2) the influence of clarity of purpose budget of local government performance, 3) the effect of feedback on the performance of local government budget, 4) the effect on the performance evaluation of local government budgets and 5) influence difficulty budgetary purposes of local government performance. The sample used in this study is that there are agencies in Pelalawan. Collecting data through a questionnaire survey method. Of the 68 questionnaires distributed, the number of questionnaires returned was 52. The data using multiple regression analysis (multiple regression) with the help of a computer program SPSS version 17.0. The results showed that: 1) Budget Participation no significant effect on the performance of Local Government, 2) Clarity of Purpose Budget significant effect on the performance of Local Government, 3) Feedback Articles significant effect on the Local Government Performance, 4) Evaluation Budget significant effect on government performance areas and 5) Difficulty Purpose Budget significant effect on the performance of Local Government. It can be concluded that the coefficient of determination 0666 or 6.66%. Figures 6.66% explained that performance is affected by the participation of local government budget, clarity of purpose budget, budget evaluation, feedback and difficult budget budgetary purposes. 33.4% while the remaining local government performance is explained by other variables not included in this study.

Keywords: Budgetary, Performance, and Government.

PENDAHULUAN

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga

pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Ramandei, 2009). Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan, maka pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah

berubah. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Pemerintah Daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran Pemerintah Daerah. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Ramandei, 2009). Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan anggaran, ada beberapa karakteristik tujuan anggaran. Karakteristik tujuan anggaran merupakan determinan utama yang melekat pada sistem anggaran agar anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu maksud yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberadaan anggaran

menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih terkendali. Menurut Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran ada lima, yaitu partisipasi anggaran (*budgetary participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budget goal difficulty*). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi, sehingga dapat memberikan suatu tingkat kepuasan. Dengan demikian, karakteristik tujuan anggaran dapat berimplikasi pada kinerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi anggaran berkaitan dengan sejauh mana bawahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Jika informasi yang diberikan oleh bawahan tidak bias, maka anggaran yang dihasilkan dalam proses penyusunan anggaran akan dapat dicapai secara optimal. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga diharapkan pemerintah dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja aparat pemerintah.

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan

anggaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi. Jadi, dengan adanya evaluasi anggaran maka dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Umpan balik merupakan hasil yang diperoleh dari upaya untuk mencapai sasaran sebagai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan. Umpan balik pada umumnya memberikan informasi kepada para pelaksana anggaran tentang kekurangan yang dapat mendatangkan perasaan tidak senang, bahkan dapat membuat masalah semakin buruk. Akan tetapi, untuk tujuan peningkatan prestasi, umpan balik tentang keberhasilan aparat adalah sangat penting meskipun dalam beberapa hal rasa tanggungjawab yang tinggi dapat berdampak negatif apabila kegagalan diungkapkan (Arifin, 2007:27). Jadi, dengan adanya informasi tentang

keberhasilan/kegagalan yang diberikan kepada para pelaksana anggaran, maka dapat meningkatkan/menurunkan kinerja mereka.

Kesulitan tujuan anggaran juga dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah. Menurut Kennis (1979) kesulitan tujuan anggaran menggambarkan adanya rentang sasaran yang sangat longgar dan mudah dicapai sama dengan sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Anggaran yang terlalu ideal (sangat ketat) akan sulit dicapai, sehingga mengakibatkan para pelaku anggaran tidak termotivasi untuk merealisasikan anggaran, bahkan dapat membuat para pelaku anggaran frustrasi, merasa gagal, serta menolak anggaran tersebut, sehingga dapat menurunkan kinerja aparat. Sebaliknya anggaran yang terlalu longgar (mudah dicapai) dapat mengakibatkan para pelaksana anggaran tidak merasa tertantang untuk berprestasi, karena tanpa bekerja keras akan timbul penyimpangan yang menguntungkan sehingga hanya memiliki pengaruh motivasi yang kecil (Arifin, 2007:27).

Rumusan dari permasalahan adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Pelalawan ?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran

terhadap kinerja Pemda di Kabupaten Pelalawan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi pada pemerintah daerah (Bastian, 2005). Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja aparat pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.

2. Karakteristik Tujuan Anggaran

Karakteristik anggaran merupakan determinan utama yang melekat pada sistem anggaran agar anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu maksud yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberadaan anggaran menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih terkendali. Menurut Kenis (1979) ada lima karakteristik tujuan anggaran (*Budgetary Goal Characteristics*) yaitu:

Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai proses organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang

menjadi tanggungjawabnya (Sumarno, 2005).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, pertimbangan, dan usulan dari bawahan kepada pimpinan dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran. Pimpinan yang mampu meningkatkan partisipasi bawahannya, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan cenderung lebih lancar daripada pimpinan yang tidak mampu meningkatkan partisipasi bawahan. Dengan meningkatnya partisipasi, maka bawahan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan kegairahan kerja serta rasa tanggungjawab dapat ditingkatkan.

Namun jika partisipasi tidak diterapkan secara benar, partisipasi dapat merusak motivasi dan menurunkan kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Darlis (2002) alasan lain mengapa partisipasi mungkin tidak berhasil adalah tidak ada usaha serius yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerjasama dari manajer tingkat bawah dan karyawan. Jika saran-saran anggaran dari orang-orang ditolak oleh tingkat yang lebih tinggi tanpa penjelasan sama sekali, atau dengan pernyataan yang fasih bahwa saran tersebut tidak sesuai dengan tujuan manajemen puncak, maka partisipasi akan dipandang sebagai suatu kepurapuraan. Orang akan kecewa dan jika hal ini terjadi, sikap negative atau bermusuhan terhadap manajemen akan berkembang, dan hal tersebut mungkin memberikan sinyal terhadap penurunan yang akan terjadi dalam efisiensi dan output.

Kejelasan Tujuan Anggaran

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Kejelasan tujuan anggaran berhubungan dengan sejauh mana tujuan-tujuan anggaran dinyatakan secara khusus dan jelas serta dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab memenuhinya. Dengan adanya kejelasan tujuan, dapat diinformasikan kepada manajer level bawah tentang apa yang diharapkan oleh manajer yang lebih tinggi. Sebaliknya, manajer yang lebih tinggi dapat mempelajari dukungan-dukungan dan persoalan-persoalan manajer di bawahnya melalui laporan-laporan dari bawah (Arifin, 2007 : 26). Keadaan seperti ini akan mendorong terciptanya kinerja yang baik. Dengan kata lain tujuan anggaran yang jelas akan mengarahkan para pelaksana anggaran untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi.

Umpan Balik Anggaran

Umpan balik merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting

dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan. Umpan balik juga dapat mendorong motivasi pelaksanaan anggaran berikutnya, umpan balik anggaran dapat menunjukkan sejauh mana sasaran anggaran telah dicapai. Apabila pelaksana anggaran tidak mengetahui hasil usahanya, maka tidak akan memiliki pegangan dalam menilai sesuai atau tidaknya suatu pekerjaan yang sedang dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan umpan balik anggaran maka dapat menimbulkan motivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Kesulitan Tujuan Anggaran

Kenis (1979) mengatakan bahwa manajer yang memiliki tujuan anggaran yang “terlalu ketat” secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki tujuan anggaran “tepat” atau “ketat tetapi dapat dicapai”. Hal ini mengindikasikan bahwa “ketat tetapi dapat dicapai” adalah tingkat untuk kesulitan tujuan anggaran.

Anggaran yang akan mudah dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak merasa ditantang untuk berprestasi karena tanpa bekerja giat pun kemungkinan akan timbul penyimpangan yang menguntungkan (*favorable*) dalam jumlah besar. Jadi, anggaran yang baik adalah anggaran dengan tingkat kesulitan yang masih memungkinkan untuk dicapai sehingga para perencana termotivasi untuk mencapai prestasi tersebut.

3. Peran Anggaran dalam Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam

perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan input maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi misi dan rencana strategis mereka dengan menggunakan input dan masyarakat/publik. Jika masyarakat ini tidak diakomodasi, maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun.

4. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran (Istiyani, 2009).

Partisipasi anggaran sebagai proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari hampir penelitian

tentang partisipasi. Sedang menurut Sord dan Welsch (1995) dalam Sarjito (2007) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula.

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kejelasan tujuan anggaran mencerminkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Apabila sasaran tidak disebutkan secara spesifik akan menyebabkan kebingungan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja (Murthi dan Sujana, 2008). Mencantumkan sasaran anggaran secara spesifik adalah lebih produktif dibandingkan dengan dengan tidak adanya sasaran yang lebih spesifik dan akan mendorong karyawan melakukan yang terbaik.

Kejelasan tujuan dapat meningkatkan kinerja manajerial, sedangkan kurangnya kejelasan mengarah pada kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana, yang berakibat pada penurunan kinerja. Manajer yang bekerja tanpa tujuan yang jelas akan dihadapkan pada tingginya ketidakpastian atas pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Istiyani, 2009).

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kejelasan Tujuan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang terjadi. Kenis (1979) menyatakan evaluasi anggaran merujuk pada tingkat dimana varian-varian anggaran dilacak kembali ke kepala departemen individu dan digunakan di dalam mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang lebih diprioritaskan pada evaluasi anggaran cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja para manajer (Ramandei. 2009).

Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Evaluasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Umpan balik terhadap sasaran anggaran merupakan variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Dengan adanya umpan balik yang diperoleh dari pencapaian sasaran anggaran dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, maka karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran (Murthi dan Sujana, 2008).

Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Umpan Balik Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan anggaran adalah range dari “sangat longgar dan mudah dicapai” sampai “sangat ketat dan tidak dapat dicapai”. Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan.

Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesulitan Tujuan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 17 dinas/SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Setiap SKPD diambil masing-masing 4 orang sebagai responden. Jadi, kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepala dinas dan

sekretariat dinas yang terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan perlengkapan, dan sub bagian perencanaan dan pengendalian. Pertimbangannya adalah responden dalam penelitian ini termasuk sebagai pegawai dinas yang menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dan peminintah daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner penelitian diadopsi dan dikembangkan atas kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel independen adalah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran.

1. Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran tersebut menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pertanggungjawaban anggaran mereka. Variabel ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Kenis (1979) yang kemudian dimodifikasikan oleh Mardiasmo (1997) dan digunakan oleh Maryanti (2002) dan Munawar (2006) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

2. Kejelasan Tujuan Anggaran

Kejelasan tujuan anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran dan kegiatan dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran (Istiyani, 2009). Variabel ini diukur menggunakan instrumen dari Maryanti (2002) dan Munawar (2006) yang mengadopsi instrumen dari Kenis (1979) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

3. Evaluasi Anggaran

Evaluasi Anggaran adalah sejauh mana selisih anggaran dan kegiatan SKPD ditelusur oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan di gunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran (Munawar, 2006). Variabel ini diukur menggunakan instrumen dari Maryanti (2002) dan Munawar (2006) yang mengadopsi instrumen dari Kenis (1979), dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

4. Umpan Balik Anggaran

Umpan Balik Anggaran adalah suatu alat ukur sejauh mana individu mengetahui sampai dimana tujuan anggaran program dan kegiatan telah dicapai (Istiyani, 2009). Variabel ini diukur menggunakan instrumen dari Maryanti (2002) dan Munawar (2006) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

5. Kesulitan Tujuan Anggaran

Kesulitan Tujuan Anggaran adalah tingkatan kesulitan pencapaian tujuan anggaran program

dan kegiatan yang dipersepsikan oleh individu dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Istiyani, 2009). Variabel ini diukur menggunakan instrumen dari Maryanti (2002) dan Munawar (2006) yang memodifikasi instrumen dari Kenis (1979) dengan pengkuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data terdiri dari uji validitas yang diukur menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dan uji reliabilitas yang diukur dengan nilai cronbatch's alpha >0,60. Sedangkan pengujian normalitas data menggunakan *normal probability plot*.

Metode Analisis

Model regresi berganda hasil kesimpulan, harus melalui pengujian kualitas data dan pengujian normalitas data. Dalam regresi berganda digunakan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari, uji multikoleniaritas yang diukur dengan nilai VIF. Apabila nilai VIF < 1 maka data dianggap tidak mempunyai persoalan multikoleniaritas.

Uji heterokedastisitas diukur dengan pengujian metode *Glejser* yaitu dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan variabel dependen absolut residual dan dari hasil tersebut semua variabel harus memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 untuk dapat dikatakan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas

Uji autokorelasi dapat diukur dengan nilai Durbin dengan cara

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression).

Pengujian Hipotesis

Pengujian untuk 5 hipotesis dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji besarnya signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel atau nilai signifikan t < 0,05 maka keputusannya adalah menerima H₁ dan menolah H₀ pada $\alpha = 5\%$.

Koefisien Determinasi(R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (kinerja pemerintah daerah). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif, Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran (X1), Kejelasan Tujuan Anggaran (X2), Evaluasi Anggaran (X3), Umpan Balik Anggaran (X4), dan Kesulitan Tujuan Anggaran (X3). Dan terdapat

satu variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi Anggaran (X1) mempunyai nilai minimum adalah 15, nilai maximum adalah 37 dan nilai rata-rata (mean) adalah 25.1538. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2) mempunyai nilai minimum adalah 16, nilai maximum adalah 23 dan nilai rata-rata (mean) adalah 19.3462. Evaluasi Anggaran (X3) mempunyai nilai minimum adalah 12, nilai maximum adalah 29 dan nilai rata-rata (mean) adalah 23.2885. Umpan Balik Anggaran (X4) mempunyai nilai minimum adalah 15, nilai maximum adalah 31 dan nilai rata-rata (mean) adalah 22.0769. Kesulitan Tujuan Anggaran (X5) mempunyai nilai minimum adalah 4, nilai maximum adalah 7 dan rata-rata (mean) adalah 6.0192. Sedangkan, Kinerja Pemerintah Daerah (Y) mempunyai nilai minimum adalah 37, nilai maximum adalah 56 dan nilai rata-rata (mean) adalah 44.8462.

Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation*, analisis ini dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

Pada penelitian ini seluruh butir instrument pengamatan yang digunakan dinyatakan valid untuk tujuan penelitian dimana keseluruhan $p < 0,05$.

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliable menunjukkan instrument sudah dipercaya sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya. Pengujian ini menggunakan metode statistik

Cronbach Alpha dengan nilai sebesar 0,6. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa data tersebut reliabel.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 20011).

Alat diagnostic yang digunakan untuk memeriksa data yang emiliki distribusi normal adalah plot peluang normal (*normal probability plot*). Jika data memperlihatkan distribusi normal, maka titiknya akan berada disekitar garis diagonal.

Berdasarkan uji normalitas dengan *normal probability plot* didapat normal p-plot menunjukkan bahwa data menyebar memalui dan mendekati garis diagonal yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan data berdistribusi normal dan layak untuk di uji.

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

Hasil uji Durbin-Watson (DW *test*) adalah sebesar 1.209. dari tabel DW dengan signifikansi 0,05. Nilai DW berada pada $-2 < DW < 2 = -2 < 1.209 < 2$, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya

autokorelasi yang berarti bahwa data ini tidak bias dan layak untuk digunakan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.666. Angka ini menjelaskan bahwa 66,6% kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran. Sedangkan sisanya 33,4% kinerja pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menunjukkan bahwa $t=-1.339$ dengan $p < 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 1 (satu) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramandei (2009) yang menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemda.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Istiyani (2009) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda.

Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menunjukkan bahwa $t=3.781$ dengan $p < 0,05$, maka terdapat pengaruh antara kejelasan tujuan anggaran kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 2 (dua) diterima.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Istiyani (2009) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ramandei (2009) bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif pada variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel sikap aparat dalam menilai kinerja Pemda.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menunjukkan bahwa $t=3.094$ dengan $p < 0,05$, maka terdapat pengaruh antara evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 3 (tiga) diterima.

Penelitian ini mendukung penelitian Munawar (2006) yang menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal.

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Istiyani (2009) dan Ramandei (2009) yang menyatakan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menunjukkan bahwa $t=2.105$ dengan $p < 0,05$, maka terdapat pengaruh antara umpan balik anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 4 (empat) diterima.

Penelitian ini mendukung penelitian Munawar (2006) yang menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran dengan variabel umpan balik anggaran berpengaruh secara positif terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang.

Penelitian ini tidak mendukung Penelitian Kholmi dan Milayanti (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif pada variabel umpan balik anggaran terhadap variabel sikap aparat dalam menilai kinerja pemda.

Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menunjukkan bahwa $t=3.448$ dengan $p < 0,05$, maka terdapat pengaruh antara kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 5 (lima) diterima.

Penelitian ini mendukung penelitian Istiyani (2009) yang menemukan bahwa kesulitan tujuan anggaran terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat pemda Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Kholmi dan Milayanti (2012) yang menemukan bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh lemah terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : hasil penelitian partisipasi anggaran menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian kejelasan tujuan anggaran menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian evaluasi anggaran menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian umpan balik anggaran menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara umpan balik anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian kesulitan tujuan anggaran menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi 0.666 atau 66,6%. Angka ini menjelaskan bahwa 66,6% kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran. Sedangkan sisanya 33,4% kinerja pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Saran

Dari penelitian ini diharapkan instansi yang terkait dapat lebih memperhatikan variabel yang tidak mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah (partisipasi anggaran) dan terus meningkatkan dan mempertahankan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Daerah didalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya mengambil 5 variabel independen. Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah untuk menciptakan kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2007. *Pengaruh Karakteristik Penyusunan Anggaran Terhadap Efisiensi Biaya. Kajian Bisnis dan Manajemen : SINERGI 9* No.1, Januari 2007.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta
- Darlis, Edfan. 2002. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran*. Jurnal Riset dan Akuntansi Indonesi, Vol. 5 No.1
- Istiyani. 2009. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kenis, Izzetin. 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review. LIV.4. Hal 707-721.
- Kholmi, dkk. 2012. *Pengaruh Budgetary Goal Characteristic Terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah; Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 2088-0685, volume 2 : 243-250.
- Maryanti, H., A., 2002. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Munawar, 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Murthi, Sujana. 2008. *Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Denpasar*. E-journal Universitas Udayana
- Ramandei, Pilipus. (2009). *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). Tesis Universitas Diponegoro Semarang.

Sardjito B, Muthaher O. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. SNA X, Makassar.

Sumarno, J. 2005. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo.

Wulandari, 2010. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Pekanbaru)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.